



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah sehingga perlu dilakukan pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait;
- b. bahwa untuk memberikan arahan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, diperlukan *Road Map* dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah yang mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang *Road Map* Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 menjadi Undang-Undang Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022-2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
6. *Road Map* Pengendalian Inflasi Daerah adalah rencana strategis yang memberikan arahan dalam pengendalian inflasi daerah.

BAB II  
*ROAD MAP*

Pasal 2

*Road Map* Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah maupun Instansi terkait dalam melaksanakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bone selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

Road Map Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan Road Map Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone, dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT., M. Si	
2. H. NAJAMUDDIN, S. Sus, MM	
3. ANWAR, SH., M. Si., MH.	
4. RAMLI, S. H.	
5. ANDI GUNAWAN, S. H., M. H.	

ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 28 Agustus 2023

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 28 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 83

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BONE  
 NOMOR 83 TAHUN  
 TENTANG  
 ROAD MAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
 TAHUN 2022-2024

ROAD MAP TPID KABUPATEN BONE 2022-2024

4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	TIMELINE TARGET			PIC
			2022	2023	2024	
Keterjangkauan Harga	Stabilitas Harga	1. Peningkatan Stabilitas harga dan stock bahan pokok, melalui koordinasi pemerintah pusat, daerah dan satgas pangan :				
		- Operasi Pasar	Pelaksanaan Operasi Pasar saat terjadi gejolak harga (min 2x)	Pelaksanaan Operasi Pasar saat terjadi gejolak harga (min 3x)	Pelaksanaan Operasi Pasar saat terjadi gejolak harga (min 4x)	Dinas Peternakan, Dinas Ketapang, Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian, Bulog
		- Pasar Murah	5 Kali	6 Kali	7 Kali	Dinas Perdagangan, Dinas ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Bagian Perekonomian, Bulog
	- Monitoring Pasokan dan Harga di pasar, toko, dan gudang distributor	- Dinas Ketapang seminggu sekali di 5 Pasar tradisional - Dinas Perdagangan seminggu sekali di 2 Pasar Tradisional - Dinas Peternakan setiap triwulan di 8 pasar tradisional - Bagian Perekonomian setiap menjelang HKBN dan Tahun Baru di 3 Pasar	- Dinas Ketapang seminggu sekali di 6 Pasar tradisional - Dinas Perdagangan seminggu sekali di 3 Pasar Tradisional - Dinas Peternakan di Setiap triwulan di 8 pasar tradisional - Bagian Perekonomian setiap menjelang HKBN dan Tahun Baru di 4 pasar	- Dinas Ketapang seminggu sekali di 6 Pasar tradisional - Dinas Perdagangan seminggu sekali di 3 Pasar Tradisional - Dinas Peternakan di Setiap triwulan di 8 pasar tradisional - Bagian Perekonomian setiap menjelang HKBN dan Tahun Baru di 5 pasar	Dinas Perdagangan, Dinas ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Bagian Perekonomian, Bulog	
	2. Optimalisasi kegiatan KPSH beras	6.900 Ton	9.424 Ton	9.424 Ton	Bulog	
	Mengelola Permintaan	Menjaga keseimbangan internal perekonomian :				Bagian Perekonomian
	3. - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	21 Kube	22 Kube	24 Kube	Dinas Sosial	
	- Pencanaan Gerakan Bangga Buatan Indonesia untuk produk UMKM	2 Kali Sosialisai	3 kali Sosialisasi	4 kali Sosialisasi		
Ketersediaan Pasokan	Produksi Domestik	1. Perluasan adopsi teknologi (IOT) dalam budidaya pertanian untuk meningkatkan produktivitas UMKM pangan melalui : - Penyempurnaan bisnis model - Penguatan /replikasi pada UMKM binaan		Tersedianya Bisnis Model		Dinas TPHP
			21 UMKM	27 UMKM	30 UMKM	

4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	TIMELINE TARGET			PIC	
			2022	2023	2024		
		2. Pengembangan lumbung pangan ( <i>Food estate</i> ) melalui peningkatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi pangan/horti</li> <li>- Wilayah lumbung pangan di daerah di sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan tangkap di 7 kecamatan pesisir dan perikanan budidaya</li> </ul>	9.878 Ton 27 Kecamatan	9.907 Ton 27 kecamatan	10.112 Ton 27 kecamatan	Dinas TPHP, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan	
		3. Pengembangan kampung hortikultura <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bawang Merah</li> <li>- Aneka Cabai</li> </ul>	3 Kecamatan (Ajangale, Barebbo, Tanete Riattang) 5 Kecamatan (Cina, Barebbo, Sibulue, Kajuara, Patimpeng)	3 Kecamatan 5 Kecamatan	3 Kecamatan 5 Kecamatan	Dinas TPHP, Dinas Ketahanan Pangan	
Ketersediaan Pasokan	Produksi Domestik	4. Pembangunan dan optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan jaringan irigasi Permukaan</li> <li>- Rehabilitas jaringan Irigasi Permukaan</li> </ul>		40 38	57 39	Dinas PSDA	
		5. Penerapan praktik budidaya sesuai Good Agricultural Practices (GAP) Good Handling Practices (GHP), & Good Manufacturing Practices (GMP) : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan jumlah kebun dan lahan usaha dengan GAP, GHP, dan GMP</li> </ul>	21.000 Ha	23.000 Ha	24.500 Ha	Dinas TPHP	
		6. Peningkatan Produksi Protein hewani <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi Ikan Tangkap (Ton)</li> <li>- Produksi Daging Ayam</li> <li>- Produksi Daging Sapi</li> </ul>	55.735,57 638 Ton 1.266 Ton	59.097,70 657 Ton 1.336 Ton	62.624,49 677 Ton 1.376 Ton	Dinas Perdagangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan	
		7. Peningkatan ketersediaan telur ayam ras tahunan	7.472 Ton	7.696 Ton	7.927 Ton	Dinas Peternakan	
		8. Modernisasi pengelolaan dan penyimpanan produk pertanian : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana</li> </ul>	3%	4%	5%	Dinas TPHP	
		9. Family Farming	2 Kecamatan	3 Kecamatan	4 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan	
		10. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan lestari (P2L)	27 Kecamatan	27 Kecamatan	27 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan	
		Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	1. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beras (CBP)</li> <li>- Produksi Beras</li> </ul>	100 Ton 950000	100 Ton 980000	100 Ton 1100000	Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas TPHP

4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	TIMELINE TARGET			PIC
			2022	2023	2024	
	Penguatan Kelembagaan	1. Penguatan kelembagaan petani pangan, peternak, dan perikanan, melalui : - Pembentukan kelembagaan kelompok tani - Pembentukan kelembagaan kelompok tani ternak - Pembentukan kelembagaan kelompok tani perikanan budidaya (klp)	739	761	784	Dinas TPHP, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan
		2. Peningkatan indeks aksesibilitas untuk pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian - Kredit Usaha Rakyat di sektor pertanian - Asuransi Petani				Dinas TPHP
		3. Pemanfaatan Skema Perbankan bagi UMKM - Sektor Perikanan	61 Orang	66 Orang	71 Orang	Dinas Koperasi, Dinas PMD, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian, Dinas TPHP, Bagian Perekonomian
Kelancaran Distribusi	Penguatan KAD	1. Penguatan dan Perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD)	Menghasilkan 1 MoU	Menghasilkan 2 MoU	Menghasilkan 3 MoU	Dinas Peternakan, Dinas TPHP, Bagian Kerja Sama, Bagian Perekonomian
		2. Fasilitasi Distribusi Pangan oleh Pasar Mitra Tani (PMT)/ Toko Tani Indonesia Centre (TTIC) dan Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI) :  - Lokasi Kegiatan  - Volume Penjualan	(TTI)  5 Kecamatan /Tahun  45 Ton	(TTI)  5 Kecamatan / Tahun  50 Ton	(TTI)  5 Kecamatan / Tahun  55 Ton	Dinas ketahanan Pangan
	Meningkatkan infrastruktur perdagangan	3. Peningkatan dan Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah 3TP melalui :  - Pemeliharaan Jalan  - Subsidi Angkutan Udara  - Penyelenggaraan Angkutan Laut	1127.37 km  1 Maskapai penerbangan perintis ATR 72 dengan rute Makassar - Bone - Kolaka dan sebaliknya  7 Rute dari pelabuhan Bajoe	1135.17 km	1142.97 km	Dinas Bina Marga, Cipta Kerja, dan Tata Ruang  Dinas Perhubungan

4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	TIMELINE TARGET			PIC
			2022	2023	2024	
Kelancaran Distribusi	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	4. Penguatan Implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir melalui :  - Fasilitasi UMKM pangan binaan dengan e-commerce di level nasional maupun daerah				Dinas TPHP
Komunikasi Efektif	Memperbaiki Kualitas Data	1. Penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegritas di pusat dan daerah				
		2. Peningkatan kualitas dan keakuratan data Pangan Daerah sebagai salah satu leading indikator pergerakan harga dan pasokan pangan daerah  - Data Pasokan  - Korelasi data harga dengan inflasi	48 kali	52 kali	58 kali	Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Statistik, Bagian Perekonomian
	Koordinasi Pusat dan Daerah	3. Penyusunan peta jalan TPID sebagai tindak lanjut penetapan peta jalan pengendalian Inflasi nasional	100%	75%		Bagian Perekonomian
		4. Peningkatan kehandalan TPID a.I melalui program pembinaan TPID/capacity building/sosialisasi :				Bagian Perekonomian, Biro Ekbang Pemprov
Mengendalikan Ekspektasi Inflasi	5. Pelaksanaan bauran kebijakan yang kredibel untuk menjaga ekspektasi inflasi melalui komunikasi yang rutin dan terpercaya  - CF terjaga di kisaran sasaran inflasi	Memperbaiki kualitas data				

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs.H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos,MM	
3. ANWAR, SH.,M.Si.,MH.	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANOI GUNAWAN, S.H.,M.H.	

ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 28 Agustus 2023

BUPATI BONE

FAHSAR M. PADJALANGI